

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkutan umum perkotaan adalah salah satu moda transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan masih menjadi primadona di kalangan masyarakat karena harganya yang terjangkau. Berdasarkan SK Walikota Sukabumi No. 70 Tahun 2016, tarif untuk pelajar adalah Rp.2000 dan Rp.3000 untuk umum. Selain itu, angkutan umum perkotaan merupakan bagian dari sistem transportasi yang memegang peranan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari. Transportasi umum ini di fasilitasi oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Meskipun angkutan umum perkotaan ini masih menjadi primadona di kalangan masyarakat menengah, tetapi masih saja ada wilayah di Kota Sukabumi yang belum dilalui oleh angkutan umum perkotaan contohnya adalah Jl. Saniin, Taman Bahagia, Benteng, Karamat dan Kabandungan. Tetapi untuk wilayah Karamat dan Kabandungan telah menjalin nota kesepahaman antara supir angkutan umum perkotaan dengan ojeg pangkalan mengenai batasan waktu jalan dan untuk angkutan umum perkotaan hanya boleh melintas selama jam sekolah.

Angkutan umum perkotaan yang tersebar di wilayah Kota Sukabumi ini berjumlah 2092 unit yang terbagi kedalam 20 trayek angkutan umum perkotaan yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Kecamatan Gunung Puyuh,

Kecamatan Citamiang, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Warudoyong. Dari jumlah 2092 unit tersebut hanya 724 unit kendaraan angkutan umum perkotaan yang melakukan perpanjangan atau peremajaan (*Sumber: Dishub Kota Sukabumi, 2018*). Perpanjangan atau peremajaan kendaraan merupakan salah satu syarat untuk memperpanjang pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan apabila Per Kelompok Kerja Unit (PERKKU) tidak melakukan perpanjangan atau peremajaan maka secara otomatis tidak dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR). Rendahnya minat PERKKU dalam melakukan perpanjangan atau peremajaan kendaraan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Rekomendasi Perkku Tahun 2018

TABEL DATA JUMLAH KENDARAAN YANG MELAKUKAN REKOMENDASI PERKKU TAHUN 2018						
SEKSI ANGKUTAN						
No	Kode Trayek	Kode Angkutan	Potensi (Unit)	Yang Melakukan Perpanjangan/Peremajaan	Yang tidak melakukan perpanjangan/peremajaan	Presentase
1	02.03.002	02	20	-	-	0%
2	02.03.005	03 A	235	68	167	28,9%
3	02.03.011	03 B	75	21	54	28,0%
4	02.03.026	04	78	50	28	64,1%
5	02.03.004	05	30	10	20	33,3%
6	02.03.006	06	20	0	20	0,0%
7	02.03.010	08	431	195	236	45,2%
8	02.03.010	09	13	13	0	100,0%
9	02.03.027	10	162	80	82	49,4%

10	02.03. 012	11	35	4	31	11,4%
11	02.03. 013	14	146	65	81	44,5%
12	02.03. 015	15	154	58	96	37,7%
13	02.03. 017	20	70	18	52	25,7%
14	02.03. 018	21	27	0	27	0,0%
15	02.03. 019	21 A	56	23	33	41,1%
16	02.03. 020	25	312	57	255	18,3%
17	02.03. 022	26	70	9	61	12,9%
18	02.03. 024	27	83	30	53	36,1%
19	02.03. 025	28	70	23	47	32,9%
20	02.03. 021	29	5	0	5	0,0%
Jumlah			2092	724	1348	34,6%

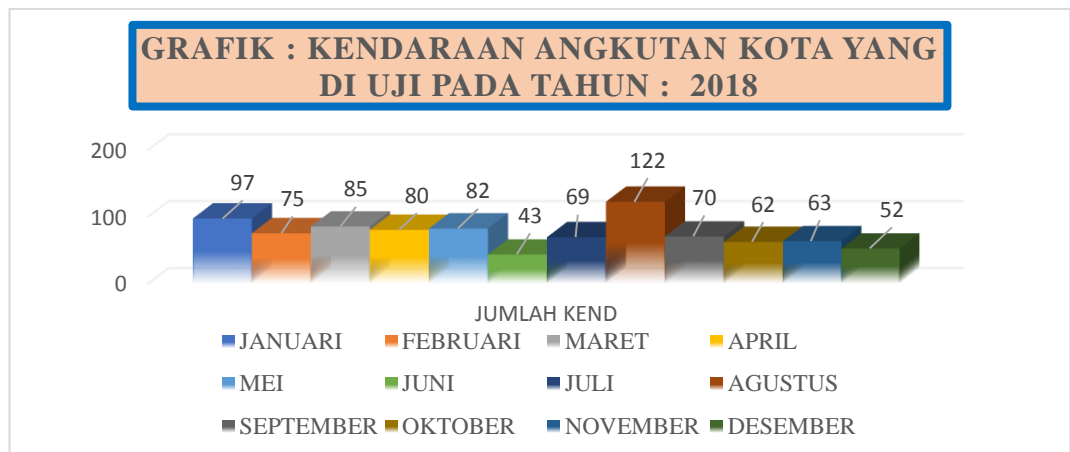
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 1348 angkutan umum perkotaan yang tidak melakukan perpanjangan/peremajaan. Hal tersebut berdampak terhadap kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan bagi masyarakat karena kurangnya rasa nyaman yang tercipta dari jasa angkutan umum. Para pengemudi angkutan umum perkotaan memiliki prinsip lebih penting mengutamakan pemasukan dibandingkan dengan melakukan perpanjangan/peremajaan kendaraan. Tentu saja tindakan tersebut tidak dibenarkan karena para pengemudi tidak mengutamakan keamanan, kenyamanan serta keselamatan penumpang yang menggunakan jasa transportasi umum. Hal tersebut dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum perkotaan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan masih

banyak sekali kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR), hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 1.1

Data Pengujian Kendaraan Bermotor 2018



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, 2019

Dari grafik diatas dapat di lihat bahwa pengujian kendaraan bermotor (KIR) berjalan sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya kenaikan maupun penurunan setiap bulannya dan pengujian kendaraan bermotor (KIR) yang tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2018, sebanyak 122 kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan yang terendah terjadi pada bulan Juni 2018, sebanyak 43 kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR). Pengujian kendaraan bermotor secara berkala ini adalah bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pengujian kendaraan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek, tarif retribusi untuk angkutan umum perkotaan sudah di tiadakan atau di gratiskan. Dalam peraturan yang sebelumnya, pemerintah mewajibkan para pemilik angkutan umum perkotaan untuk membayar tarif retribusi pengujian berkala sebesar Rp. 50.000. Kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan akan keselamatan berkendara menjadi salah satu faktor utama akan minimnya pengujian kendaraan bermotor (KIR).

Kesadaran dalam menciptakan keamanan, kenyamanan serta keselamatan tidak hanya bergantung kepada Dinas Perhubungan saja tetapi para pemilik kendaraan angkutan umum perkotaan pun ikut berperan serta. Apabila keduanya dapat menjalankan peran tersebut dengan seharusnya, maka akan tercipta angkutan umum perkotaan yang aman, nyaman dan selamat. Sehingga dapat meningkatkan kembali animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa fenomena masalah yang peneliti temukan di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan

Pengemudi angkutan umum perkotaan menarik biaya/tarif angkutan diluar ketentuan pemerintah yang seharusnya Rp. 3000 menjadi Rp. 4000.

2. Peran sebagai strategi

Rendahnya minat pengujian kendaraan bermotor (KIR) para pemilik angkutan umum perkotaan. Hanya 43% yang melakukan Uji KIR atau

sebanyak 900 unit dari 2092 unit kendaraan yang tersebar di tujuh Kecamatan yang ada di Kota Sukabumi.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Belum meratanya jadwal pelayanan angkutan umum perkotaan. Seperti trayek 26, 21A dan 05 yang masih di jadwal dari pukul 05.00-17.00 WIB.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Belum meratanya penyebaran angkutan umum perkotaan di Kota Sukabumi karena sebagian wilayahnya masih dikuasai oleh ojeg pangkalan. Adapun wilayah yang belum dilalui oleh angkutan umum perkotaan adalah Jl. Saniin, Taman Bahagia, Benteng, Karamat dan Kabandungan.

Transportasi merupakan salah satu sarana yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dapat mempermudah berbagai macam aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Sehingga dengan adanya transportasi segala aktivitas kita menjadi terakomodasi. Tak bisa kita bayangkan apabila dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada sarana transportasi, kegiatan kita menjadi terhambat, akses menuju tempat satu ke tempat lainnya menjadi terganggu.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi.”***

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan terkait dengan rendahnya minat pengujian kendaraan bermotor, tarif yang tidak sesuai, belum meratanya jadwal pelayanan dan tidak meratanya penyebaran angkutan umum perkotaan.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menata dan mengelola angkutan umum perkotaan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam proses pengelolaan angkutan umum perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Dinas Perhubungan dalam menata maupun mengelola angkutan umum perkotaan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung apa saja yang terjadi dalam proses pengelolaan angkutan umum perkotaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Kegunaan aspek teoritis dari penelitian ini yaitu untuk pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan pengembangan pemahaman khususnya mengenai peran.

2. Aspek Praktis

Kegunaan aspek praktis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai suatu bahan masukan positif bagi bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA) Seksi Angkutan dan rujukan terpadu Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam hal perbaikan peningkatan penataan serta pengelolaan angkutan umum perkotaan.